

## LAPORAN PERJALANAN DINAS

Dari : Kelompok Pakar/Tim Ahli Bapemperda DPRD  
Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepada : Sekretaris DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara  
Tanggal : 19 s/d 21 Desember 2024  
Perihal : Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas biasa kelompok Pakar/Tim Ahli  
Dalam rangka Rapat Kerja Pansus Raperda Penyelenggaraan Perizinan  
Berbasis Resiko ke Perangkat Daerah DPMPTSP Kota Bontang

1. Nomor/Tanggal

Atas Nama dan Jabatan : Hefni Efendi, S.H.I., M.H.  
Tim Ahli DPRD Kab. Kutai Kartanegara

2. Maksud Perjalanan Dinas : Perjalanan Dinas biasa kelompok Pakar/Tim Ahli  
Dalam Rangka Rapat Kerja Bersama DPMPTSP Kota Bontang untuk pembahasan  
Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko.

3. Tujuan Perjalanan Dinas : DPMPTSP Kota Bontang.

4. Tanggal Pelaksanaan : 19 s/d 21 Desember 2024

5. Pejabat Yang Ditemui : DPMPTSP Kota Bontang.

Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko yang dilakukan oleh Pansus DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara di DPMPTSP Kota Bontang, langsung dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Khusus, bapak Eko Wulandanu, SH. beserta anggota DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membahas berkenaan dengan pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Pansus Eko Wulandanu	:	- - Hasil dari informasi lapangan ada beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan perizinan berbasis resiko
-------------------------------	---	--

	<p>diantaranya adalah keterbatasan jaringan internet terkhusus untuk daerah-daerah pedesaan yang memang tidak terjangkau dari Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selain itu keterbatasan sumber daya manusia atau masyarakat yang tidak memahami dengan mendalam tentang mekanisme proses perizinan berbasis resiko, dan banyak masyarakat khususnya pedesaan yang merasa sangat sulit dalam melakukan atau mendapatkan perizinan.</li> <li>-</li> </ul>
Vinson, S.STP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk melihat dan memilah usaha berdasarkan resiko rendah menengah rendah menengah tinggi dan tinggi dapat dilihat di KBLI</li> <li>- Tugas DPMPTSP melakukan validasi atas persyaratan yang diajukan oleh pemohon pada saat mengajukan perizinan</li> <li>- Untuk perizinan berbasis resiko rendah tidak ada sanksi namun akan kesulitan dalam mendapatkan bantuan dari pemerintah karena proses mendapatkan bantuan dari pemerintah harus dapat izin melalui OSS, seperti UMKM</li> <li>- Untuk peizinan berbasis resiko tinggi sangat ketat dalam proses perizinannya sehingga jika menimbulkan permasalahan atau berdampak kepada masyarakat maka ada sanksi yang diberikan seperti penutupan tempat usaha.</li> <li>- Dalam meningkatkan perizinan di masyarakat kami melakukan sosialisasi dengan bekerjasama OPD, kemudian melakukan Bimtek, bahkan para anggota dewan yang menitipkan dana aspirasinya untuk membuat sebuah kegiatan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya perizinan dalam menjalankan uasaha.</li> </ul>

Hamdiah Z, S.Pd		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan dari pemberlakuan Perda ini adalah untuk membantu masyarakat khususnya masyarakat menengah agar mudah dalam mendapatkan izin dalam melaksanakan usaha.</li> <li>- Bentuk perhatian khusus kita terhadap Masyarakat dalam proses perizinan adalah mempermudah proses karena Masyarakat khususnya menengah kebawah masih banyak yang tidak paham terkait proses perizinan berbasis online.</li> <li>-</li> </ul>

### **Penutup**

Demikian Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas biasa kelompok Pakar/Tim Ahli Komisi II Dalam Rangka Rencana Evaluasi Capaian Kinerja Bidang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2024 dan Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.

### **Kelompok Pakar/Tim Ahli Bapemperda**

1. Hefni Efendi, S.H.I., M.H.



.....

**Lampiran**  
**Dokumentasi Kegiatan**

